PEMERIKSAAN PERKARA GUGATAN PENETAPAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA

Muhammad Haddad Alwi Nasution¹, Ramadhan Syahmedi Siregar²
muhammadhaddadalwinasution16@gmail.com¹, ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Pengadilan Agama di Indonesia adalah salah satu lembaga yang menampung persoalan kewarisan terlepas dari akumulasi persoalan yang ada di dalamnya. Dalam kajian ini difokuskan terhadap bagaimana system itu berjalan terkait penetapan ahli waris di Pengadilan Agama. Studi ini mengedepankan studi kepustakaan dengan mencermati, menggali serta menyimpulkan literatur yang dipakai dalam studi ini. Pada akhirnya akan diketahui bahwa Pengadilan Agama akan menetapkan/memutuskan siapa yang menjadi pewaris, ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris setelah sebelumnya mengajukan permohonan atau gugatan terkait dengan penetapan ahli waris dan melengkapi persyaratan yang ada.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Penetapan Ahli Waris (PAW), Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP).

PENDAHULUAN

Kewarisan adalah hal yang sangat kompleks sekali mengingat setiap insan akan sampai pada derajat kematian pada akhirnya. Hukum merupakan jalur utama dalam hidup dan berkehidupan, begitu juga halnya dalam kewarisan mempunyai aturan tersendiri. Ada beberapa hukum yang dipakai dalam mengevaluasi kewarisan ini, diantaranya ada Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat.

Menurut Eman Suparman, hukum waris adalah segenap peraturan terkait pengaturan harta kekayaan sebab meninggalnya seseorang, dalam artian lain pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si mait kepada orang yang mempunyai hubungan dengannya.

Dalam pengaturan tersebut di Indonesia ada lembaga yang dipercaya untuk mengatasi persolan yang demikian antara lain Pengadilan Negeri (bersifat umum) dan Pengadilan Agama (bagi umat Islam) serta memakai rujukan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPendata (Burgerlijk Wetbook). Secara sefesifiknya tentang tatacara penetapan ahli waris ini akan dirangkum dalam pembahasan selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini fokusnya ialah penelitian kepustakaan (library research), yakni menggali data, literatur atau dokumen (study document) yang bersesuaian dengan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk dijadikan bahan rangkuman dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu hukum dan peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peradilan Agama

Setelah Indonesia merdeka, kekuasaan peradilan agama yang sebelumnya dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda, mulai dipulihkan secara bertahap berkat upaya gigih para mujahidin Islam Indonesia. Tepatnya tahun 1957, Peraturan Pemerintah Nomor 45 diundangkan guna mendefinisikan kembali kewenangan Inkuisisi. Salah satu ketentuan penting tersebut adalah Pasal 4 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutus perselisihan seperti perkawinan, talak, penyelesaian, fasaq, nafkah, mahar (mahar), perumahan (maskan), mu'a, dan berbagai persoalan lainnya menyatakan bahwa ada. Hadhanah, suksesi (mal suksesi), wakaf, hibah, sadaqah, Baitul mal, dll.

Ketetapan ini efektif menjadi dasar hukum pembentukan Inkuisisi di luar Jawa dan Madura, menetapkan kewenangan absolutnya. Namun munculnya aturan ini juga akan menimbulkan dualisme sistem peradilan agama, antara pengadilan di Jawa dan Madura dengan pengadilan di luar daerah. Di Jawa dan Madura dalam menyelesaikan sengketa harta benda Pengadilan Agama tidak berwenang, misalnya sengketa waris, namun sebaliknya Pengadilan Agama selain di Jawa dan Madura ada kewenangannya. Perbedaan ini juga menyebabkan adanya perbedaan yurisdiksi, dimana sengketa waris antara umat Islam selain di daerah Jawa dan Madura Pengadilan Agama yang memutuskan perkara, sedangkan untuk daerah Jawa juga Madura masih ditangani oleh pengadilan umum dengan mengacu pada hukum adat.

Meskipun Peradilan Agama di Jawa dan Madura tidak memiliki kewenangan formal dalam menyelesaikan sengketa waris, hal ini tidak berarti bahwa Pengadilan Agama (yang pada waktu itu belum termasuk Pengadilan Tinggi Agama) tidak memberikan keputusan terkait waris. Pada periode tersebut, Pengadilan Agama tetap menangani kasus waris yang tidak melibatkan sengketa. Penyelesaiannya dilakukan dalam bentuk fatwa waris. Masyarakat Muslim pada umumnya merasa lebih nyaman jika masalah waris mereka dapat diselesaikan sesuai dengan hukum Islam oleh Pengadilan Agama. Fatwa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, meskipun sifatnya deklaratif, lebih diterima dan lebih akrab bagi mereka dibandingkan dengan putusan formal dalam bentuk vonis.

Proses pembuatan fatwa waris melibatkan satu pihak atau lebih yang secara sukarela mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut kemudian diproses oleh hakim ketua Inkuisisi setelah memeriksa bukti-bukti yang membuktikan adanya hubungan waris antara pemohon dan ahli waris. Alat bukti tersebut meliputi bukti tertulis dan keterangan saksi. Fatwa waris menentukan siapa ahli waris dan ahli waris serta menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama di berbagai penjuru Indonesia kembali mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa waris, seperti yang terjadi pada tahun 1882 hingga tahun 1937. Pasal 49 undang-undang tersebut mengatur bahwa Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi atas perkara-perkara seperti perkawinan, warisan, wasiat, dan hadiah menurut hukum Islam, serta perkara wakaf dan shaddaq.

Dengan diberikannya kewenangan terhadap Pengadilan Agama untuk memutus sengketa waris, proses penyelesaian waris dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Sebagai konsekuensinya, fatwa waris tidak lagi berlaku setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diberlakukan. Peran fatwa waris digantikan oleh P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan), yang mengacu pada Pasal 107 ayat (2) UU Pokok Agraria.

Syarat penyelesaian perkara waris melalui P3HP ada dua, yaitu pembagian harta warisan tanpa perselisihan, dan adanya permohonan pembagian harta warisan. P3HP sering juga disebut dengan Akta Suksesi atau Akta Perdamaian. Yang dimaksud dengan "instrumen" adalah suatu dokumen yang ditandatangani dan disiapkan untuk digunakan sebagai bukti suatu peristiwa untuk keperluan pihak yang membuat dokumen tersebut. Sebaliknya, "Perbandingan" berasal dari bahasa Belanda (*comparie: schijning van partyjen*) dan mengacu pada bagian dokumen yang mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Dokumen penyelesaian ini kemudian digabungkan dengan akta tersebut sehingga membentuk akta perdamaian. Akta perdamaian memuat surat-surat mengenai pembagian harta warisan kepada para pihak yang mengajukan kepada hakim ketua Pengadilan Agama.

P3HP dan fatwa waris mempunyai muatan perintah yang selaras: menentukan ahli siapa yang mewarisi serta menentukan bagiannya. Namun perbedaan keduanya terletak pada bagian formil dan materilnya. Nama fatwa cenderung berasal dari tradisi ulama dan hakim tertentu yang mengeluarkan fatwa terhadap perkara yang disinggungkan kepada mereka. Sebaliknya, Akta Pelunasan/Warisan atau P3HP biasanya mengikuti praktik perdata Barat yang berlaku bagi Notaris dari segi tata cara. Ketika Ketua Pengadilan Agama menetapkan waris dalam bentuk P3HP, terlihat bahwa mereka "memosisikan" diri mereka seperti notaris, mengikuti praktek hukum keperdataan Barat. Hal ini merupakan perbedaan dalam pendekatan formal antara fatwa waris yang didasarkan pada tradisi fikih dan P3HP yang mengikuti model keperdataan Barat.

Pengaturan mengenai pewarisan dengan model P3HP tidak dipakai lagi dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2006, penggantian terhadap UU No. 7 Tahun 1989. Sesudah diberlakukannya UU ini, via Judul II Mahkamah Agung mengarahkan Pengadilan Agama untuk: Mendengar Kasus Warisan AS Format Penentuan Warisan atau PAW dan bukan dilengkapi dengan format P3HP lagi. Asas pada ketentuan ini mengikuti "penghapusan peraturan selanjutnya", dan regulasi terbaru tersebut ialah Pasal 49 (b) UU No. 3 Tahun 2006 beserta penjelasan regulasi sebelumnya.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama telah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan berkembangnya zaman, semisal menggunakan putusan pengadilan, fatwa waris, dan P3HP. Selain itu, ada juga proses penetapan ahli waris. Idealnya, di masa depan, semua proses ini dapat disatukan kembali ke dalam satu bentuk, yaitu putusan pengadilan, termasuk penggunaan *acta vandading* (akta perdamaian). Hal ini akan mempermudah dan menyederhanakan proses penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama.

Tugas utama lembaga pengadilan ialah menerima, memeriksa, mengadili, dan menuntaskan persoalan/perkara atau sengketa yang masuk ke ranah/ruang lingkup kewenangannya. Namun,

permohonan bukanlah perkara atau sengketa dalam arti sebenarnya, sehingga secara murni tidak termasuk dalam tugas pokok peradilan. Namun, demi keadilan dan kebutuhan hukum pencari keadilan, badan peradilan diberi kewenangan untuk menangani permohonan secara terbatas, yaitu hanya yang diatur oleh undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Ini menunjukkan fleksibilitas sistem peradilan dalam mengakomodasi berbagai macam kebutuhan hukum masyarakat.

Proses lahirnya penetapan ahli waris memang dimulai dari permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan proses seputar permohonan ini. Permohonan penetapan ahli waris biasanya diajukan oleh pihak yang berkepentingan, seperti keluarga atau pihak yang merasa memiliki hak waris akan pusaka seseorang yang sudah meninggal dunia. Proses permohonan ini melibatkan beberapa langkah yang perlu dipahami:

1. **Penyampaian Permohonan:** Pihak yang berkepentingan membuat permohonan penetapan ahli waris ditujukan ke Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut. Permohonan ini biasanya disampaikan secara tertulis dan berisi informasi lengkap mengenai identitas pemohon, hubungan dengan pewaris, serta klaim atas bagian warisan.
2. **Pemeriksaan Berkas Permohonan:** Pengadilan Agama akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang diajukan. Ini meliputi dokumen-dokumen yang mendukung klaim ahli waris, seperti akta kelahiran, akta nikah, surat-surat kekeluargaan, atau bukti lainnya yang relevan.
3. **Sidang:** Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Pengadilan Agama kemudian menjadwalkan sidang untuk memeriksa bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak terkait. Dalam sidang ini, pemohon dan pihak-pihak terkait lainnya dapat mengemukakan klaim dan pembelaan mereka.
4. **Putusan:** Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan penetapan ahli waris. Putusan ini akan menetapkan siapa saja yang diakui sebagai ahli waris sah dan bagaimana pembagian harta waris akan dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
5. **Pelaksanaan Putusan:** Putusan Pengadilan Agama mengenai penetapan ahli waris bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Hal ini bisa melibatkan proses eksekusi putusan untuk memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikianlah gambaran umum mengenai proses permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama. Proses ini merupakan bagian penting dalam menyelesaikan sengketa waris dan menegaskan hak-hak ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Perbedaan Permohonan dan Gugatan

Menurut Retnowulan Sutantio, dalam kasus gugatan terdapat sengketa atau konflik yang harus diputus oleh pengadilan. Sementara untuk kasus permohonan, artinya bukan dalam hal sengketa, hakim hanya memberikan justifikasi, yang sering dikatakan dengan putusan *declaratoir* dengan tujuan untuk menerangkan atau menetapkan saja.

Menurut keterangan M Yahya Harahap, permohonan atau gugatan sukarela adalah perkara perdata yang disinggungkan dengan model permohonan yang ditanda tangani oleh si pemohon ataupun kuasa hukumnya, kemudian tunjukannya adalah untuk hakim ketua. Selanjutnya, Yahya dalam gugatannya mengatakan ada perselisihan antara dua pihak atau lebih. Persoalan yang diangkat dan diselesaikan dalam litigasi ialah perselisihan atau perselisihan antar para pihak. Penyelesaian sengketa secara hukum melibatkan proses sanggahan berupa replik dan duplik.

Permohonan dan gugatan menghasilkan produk yang berbeda. Permohonan menghasilkan penetapan, sementara gugatan menghasilkan putusan. Putusan hakim memiliki tiga macam kekuatan: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.

C. Penetapan Ahli Waris

Berkenaan dengan penetapan ahli waris harus diketahui bahwa dalam hal kewarisan ini ada 3 poin ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Harta Peninggalan.
2. Pewaris.
3. Ahli Waris.

Sesuai dengan 3 poin diatas, pertama, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan si pewaris dalam bentuk hak milik bukan dalam bentuk hak pakai atau yang semisalnya. Kedua, pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta dan selanjutnya disebut dengan harta peninggalan atau harta warisan. Ketiga, ahli waris adalah orang yang hidup di saat meninggalnya pewaris dan mempunyai hubungan pertalian kekerabatan dengan pewaris.

Di dalam KHUPerdata disebutkan bahwa ada 2 kategori tentang bagaimana seseorang bisa memperoleh warisan :

1. Secara Ab Intestato/Wettelijk Erfrecht, artinya seseorang mendapatkan warisan sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Secara Testamentair, artinya seseorang mendapatkan warisan sebab wasiat yang ditujukan kepadanya.

Menurut Hukum Perdata, penentuan siapa yang berhak menerima harta warisan diatur secara limitatif, yaitu :

1. Ahli waris yang mewarisi menyesuaikan kedudukannya sendiri atau mewarisi secara langsung:
 - a. Kelompok pertama: meliputi suami atau istri yang berumur paling panjang, anak-anak dan keturunan langsungnya (baik sah maupun tidak sah). Mereka menyingkirkan keluarga lain dari atas dan samping.
 - b. Kelompok kedua : meliputi orang tua dan saudara kandung ahli waris. Namun bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta warisan.
 - c. Kelompok ketiga: Bila kelompok pertama dan kedua tidak ada, maka harta warisan itu dibagi menjadi dua bagian, separuhnya menjadi milik kakek dan nenek dari pihak ayah, dan separuh lagi menjadi milik kakek dan nenek dari pihak ibu.
 - d. Kelompok keempat: meliputi sanak saudara ahli waris yang berbeda garis keturunan sampai dengan derajat kekerabatan ke-6.
2. Mewarisi berdasarkan penggantian :
 - a. Perpindahan linier ke bawah : Anak pertama yang meninggal digantikan oleh seluruh cucu atau anak ahli waris. Jika semua anak yang menjadi ahli waris dalam kapasitasnya sendiri ternyata onwaardig onterfd (tidak layak mendapat warisan), maka muncullah cucu ahli waris dalam kapasitasnya sendiri.
 - b. Warisan garis lateral: Saudara kandung atau saudara tiri yang meninggal terlebih dahulu digantikan oleh seluruh anak-anaknya.
 - c. Warisan garis lateral adalah penggantian anggota keluarga yang lebih jauh: Misalnya, paman/keponakan jika dia meninggal terlebih dahulu, dia akan digantikan oleh anaknya (keturunan pengganti).

Secara keseluruhan, terdapat 25 ahli waris, terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan. Namun, tidak semua dari 25 orang tersebut akan menerima warisan. Ahli waris yang berhak menerima warisan adalah mereka yang merupakan kerabat terdekat dan tidak terhalangi oleh ahli waris lainnya. Oleh karena itu, disarankan untuk membuat gambar atau skema beserta nomor urut untuk setiap struktur ahli waris guna mempermudah dalam penentuan siapa yang berhak menerima warisan.

Pasca diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 untuk pertama kali mengganti UU No. 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama, maka penyelesaian perkara waris di peradilan agama dapat dilakukan dengan dua cara, *volunter* dan *contencius*.

Hal ini berdasarkan penjabaran UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 periode (b) megatakan bahwa tunjukan dari kara “warisan” meliputi penetapan siapa yang mendapat warisan, identifikasi harta warisan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan bagian harta warisan, melakukan pembagian aset. warisan sekaligus keputusan pengadilan atas permintaan seseorang untuk menentukan siapa yang mendapat warisan dan menentukan pembagiannya.

Kalimat “Yang disebut dengan ‘Waris’ ialah menetapkan siapa yang akan mendapat warisan, menetapkan harta warisan, menetapkan kepentingan tiap-tiap yang mewarisi, dan melaksanakan pembagian pusaka. Hakim telah menyatakan bahwa: Ini adalah subyek sengketa warisan. Dalam hal demikian, terjadi perselisihan mengenai warisan, dan penyelesaiannya harus diselesaikan melalui proses hukum adversarial agar dapat diputuskan oleh hakim.

Dalam kalimat sesudahnya, "Serta putusan pengadilan terkait permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris” tidak disebutkan tentang penentuan harta warisan. Oleh karena itu, hakim hanya menentukan siapa ahli waris dan siapa ahli warisnya, lalu menentukan bagian warisan masing-masing orang, tanpa menyebutkan subjek warisan. Oleh karena itu, permohonan penentuan siapa yang mewarisi tidak boleh ditentang juga status kepemilikan ahli waris

Dalam masalah warisan di Pengadilan Agama, terdapat dua cara yang dapat ditempuh :

1. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama:

Jika Anda menggunakan opsi ini, berarti ada konflik terkait objek warisan. Perselisihan ini dapat timbul antar ahli waris karena ada beberapa ahli waris yang menolak membagi harta warisan. Proses akhir perkara ini akan menghasilkan pengajuan dokumen hukum berupa Putusan.

2. Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama:

Dengan opsi ini, ahli waris Anda pasti akan mengajukan permohonan. Atas permohonan, pengadilan menerbitkan dokumen hukum berupa keputusan.

PAW ialah suatu gugatan yang dimohonkan oleh seorang yang mewarisi ke Pengadilan Agama dimaksudkan untuk pentapan sebagai orang yang mewarisi secara sah atas harta atau kekayaan ahli waris yang sudah mati. Secara umum permohonan pengangkatan ahli waris dimohonkan ke Pengadilan Agama oleh orang yang mewarisi untuk keperluan tersebut. Beberapa tujuannya adalah :

1. Melakukan penjualan atas properti atau barang yang dimiliki oleh pewaris dengan tujuan untuk kemudian dibagikan kepada ahli waris.
2. Mengambil uang atau deposito yang dimiliki oleh pewaris yang disimpan di bank.
3. Mengurus pencairan dana asuransi yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya untuk kemudian dibagi kepada para ahli warisnya.
4. Melakukan jaminan atas aset atau barang yang dimiliki oleh pewaris kepada pihak ketiga atau bank.
5. Melakukan pelunasan utang yang dimiliki oleh pewaris.

Dalam melaksanakan pembagian Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam, langkah pertama yang penting adalah memahami sistematika penyelesaiannya, Setelah itu, langkah-langkah yang harus dilalui adalah:

1. Penentuan Ahli Waris: Mengidentifikasi siapa saja ahli waris yang berhak menerima bagian dari warisan.
2. Perhitungan Warisan: Menentukan jumlah total harta warisan yang akan dibagi.
3. Pembayaran Utang: Melunasi utang-utang yang dimiliki oleh pewaris menggunakan harta warisan sebelum pembagian dilakukan.
4. Pelaksanaan Faraid: Memastikan pembagian sesuai dengan ketentuan faraid (pembagian wajib) yang telah ditetapkan dalam Hukum Waris Islam.
5. Pembagian Sisa Warisan: Setelah mengikuti langkah-langkah sebelumnya, sisa warisan kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris dan keinginan pewaris jika ada wasiat

yang sah.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan benar, masalah warisan yang rumit sekalipun dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip Islam.

Ketika mengajukan permohonan penetapan warisan, Inkuisisi akan memutuskan :

1. Menetapkan siapa yang menjadi Pewaris.
2. Menentukan siapa yang mendapat warisan.
3. Menetapkan pusaka yang ditinggal oleh Pewaris.
4. Menentukan bagian segenap orang yang mendapat warisan.

Adapun syarat yang perlu dipersiapkan untuk Penetapan Ahli Waris di pengadilan meliputi :

1. Permohonan Perihal Penetapan Waris secara tertulis dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
2. KTP Pewaris.
3. Kutipan Akta Kematian Pewaris atau Surat Keterangan Kematian Pewaris.
4. Tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris.
5. Akta Kelahiran Ahli Waris.
6. KK.
7. Buku Nikah Pewaris.
8. Surat-surat terkait aset yang dimaksudkan untuk sebagai bagian dari pusaka yang akan dibagi.
9. Menyiapkan 2 orang saksi.

Pola permohonan identifikasi ahli waris dalam Permohonan Warisan (PAW) ke Pengadilan Agama bisa berbeda-beda tergantung ahli waris yang mengajukan permohonan. Model permintaan umum yang dapat digunakan meliputi::

1. Permohonan hanya mencakup segenap pihak yang menjadi ahli waris, dalam istilah lain lebih tepatnya para pemohon adalah para ahli waris yang memiliki kepentingan langsung dalam proses penetapan waris di pengadilan. Pada keadaan ini, segenap ahli waris tersebut mengajukan permohonan untuk menetapkan status dan hak-hak mereka sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris yang berlaku.
2. Permintaan mencakup segenap pihak yang menjadi ahli waris, juga meminta bagian dari pusaka yang ada. Dalam hal ini, para pemohon, yang juga merupakan ahli waris, mengajukan permohonan untuk menetapkan status mereka sebagai ahli waris yang sah dan juga meminta bagian yang dianggap mereka berhak terima dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. Permintaan mencakup pihak yang berhak menjadi ahli waris, menentukan harta pusaka dan juga permohonan untuk bagian yang menjadi hak dari ahli waris. Dalam hal ini, pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan status mereka sebagai orang yang mendapat warisan yang sah, menetapkan harta pusaka yang akan dibagi, dan juga meminta bagian yang dianggap mereka berhak terima dari harta warisan tersebut.

Dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris, terdapat dua cara yang dapat dilakukan :

1. Pengajuan Langsung ke Pengadilan Agama: Para ahli waris dapat mengajukan permohonan secara langsung ke Pengadilan Agama dengan menyampaikan semua dokumen yang diperlukan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.
2. Melalui Bantuan Pengacara: Para ahli waris juga dapat mengajukan permohonan melalui bantuan seorang pengacara atau firma hukum yang berpengalaman dalam urusan waris. Pengacara akan membantu dalam menyusun dan mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan serta memberikan nasihat hukum selama proses pengajuan permohonan.

Kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan preferensi dari para ahli waris yang bersangkutan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan disiapkan dengan baik dan prosedur pengajuan diikuti secara teliti untuk meningkatkan peluang permohonan diterima oleh pengadilan.

Proses pengajuan permohonan identifikasi ahli waris ke PTSP Pengadilan Agama Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemohon mendatangi Pengadilan Agama PTSP di kota tujuan dan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Sesampainya di PTSP, peserta akan mendapat nomor baris loket pendaftaran dan menunggu dipanggil oleh petugas.
4. Setelah menerima rincian perkiraan biaya dari Petugas Pendaftaran, para pihak membayar uang jaminan biaya perkara kepada bank yang ditunjuk.
5. Para pihak selanjutnya menyerahkan bukti pembayaran beserta dokumen persyaratannya kepada petugas pendaftaran PTSP.
6. Panitera PTSP akan mendaftarkan dan mengembalikan salinan permohonan kepada para pihak beserta nomor perkaranya.
7. Para pihak selanjutnya menunggu konfirmasi juru sita/wakil juru sita Pengadilan Agama setempat yang bersangkutan. Panggilan akan tiba pada tanggal sidang yang telah disepakati.

Biaya pengajuan permohonan identifikasi ahli waris ke Pengadilan Agama Kota adalah :

1. Pendaftaran /PNBP : Rp30.000.
2. Pendaftaran /ATK : Rp75.000.
3. Meterai : Rp10.000.
4. Penyuntingan : Rp10.000.
5. PNBP pemanggilan masing-masing penggugat dan tergugat : Rp10.000.
6. Biaya pemanggilan penggugat dan tergugat (menyesuaikan jarak sesuai Peraturan Panjal Ketua Pengadilan Agama kota tujuan).

Dengan memperhatikan semua biaya tersebut, pihak yang mengajukan permohonan perlu menyiapkan dana sesuai dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

KESIMPULAN

Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama memiliki sebuah persyaratan yang harus dipenuhi dan seharusnya diketahui pihak yang bermaksud untuk mengajukan permohonan PAW tersebut. Hala-hal terkait dengan penetapan sebelumnya harus mempersiapkan segala persyaratan, baik itu persyaratan sebagai ahli waris, pewaris ataupun tentang warisan yang akan dibagikan. Tidak kalah pentingnya adalah persyaratan administrasi yang berlaku di Pengadilan Agama, cukup mendetail sebenarnya persiapan tersebut, namun dalam hal keterbatasan bisa memakai jasa advokat/pengacara untuk membantu proses PAW tersebut. Betul memang ada 2 model dalam pengajuan PAW ini, secara mandiri atau via jasa advokat/pengacara, tetapi alangkah lebih memudahkan lagi dengan menggunakan jasa pelayanan yang ada.

Pada akhirnya nanti Pengadilan Agama setempat akan memberikan penetapan/putusan, baik itu ajuan dalam permohonan ataupun gugatan. Penetapan/putusan itu berisikan siapa saja yang menjadi ahli waris, siapa pewaris, bagaimana pusaka yang ditinggalkan serta bagian dari segenap ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, H. Moh., "Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Warisan," *Media Bina Ilmiah*, Vol, 13, No. 6, Januari 2018.
- Fahrullah, Ade Fariz, "Ahli Waris dalam Perpektif Hukum Islam dan KHUPerdata (Burgerlijk Wetbook)," *Hukum islam*, Vol, 21, No, 1, Juni 2021.
- Harahap, Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. 2018.
- Lubis, Suhardi K, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Munarif, et. al., "Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia: Studi Perbandingan," *Almashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2022.

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, “Pendaftaran Penetapan Ahli Waris,” [Https://Pa-Tasikmalayakota.Go.Id](https://Pa-Tasikmalayakota.Go.Id) diakses pada 27 April 2024.

Zahri, H. A. “Penetapan Ahli Waris dan Implikasinya,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses pada 27 April 2024.